

BAB V

KESIMPULAN

Amerika Serikat merupakan negara adikuasa dengan dinamika kebijakan politik luar negeri yang dinamis. Kebijakan luar negeri yang diputuskan oleh Amerika Serikat disesuaikan dengan isu politik internasional dan kepentingan Amerika Serikat di dalamnya. Penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada perang dunia I maupun II dan perang dingin tentu berbeda, begitu juga ketika serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 di jantung kota New York Amerika Serikat atau tragedi WTC memaksa Amerika Serikat mengubah kebijakan dengan cepat. Peristiwa yang mengguncang publik dunia memunculkan fenomena baru di dunia internasional mengenai ancaman yang sedang akan dihadapi dunia, yaitu terorisme. Amerika Serikat merasa memiliki tanggungjawab besar untuk berperan memerangi terorisme demi upaya keamanan dan perdamaian dunia. Sehingga kebijakan Amerika Serikat berubah ke arah perlawanan kepada tindak terorisme dalam bentuk apapun yang dikenal dengan kampanye *Global War on Terrorism*. Kampanye WOT ini diupayakan Amerika Serikat melalui kebijakan pengiriman pasukan militer ke berbagai negara yang terindikasi kelompok terorisme radikal.

Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pasca perang dunia II lebih banyak diwarnai dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan politik internasional. Amerika Serikat merasa bahwa dunia membutuhkannya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang diakibatkan selama berlangsungnya perang dunia tersebut, sehingga menjadi momentum untuk dapat berperan aktif dan mengambil alih kepemimpinan global. Upaya dominasi kekuatan dunia oleh Amerika Serikat dilakukan dengan cara membentuk aliansi yang bertujuan untuk mengatur pertahanan Amerika Serikat (*U.S Defense Arrangement*) dalam upaya peningkatan peran dan kedudukan Amerika Serikat di mata dunia, diantaranya *The Rio Pact*, NATO dan beberapa aliansi lainnya baik

bilateral, multilateral maupun regional dan peningkatan henemoni Amerika Serikat di dunia.

Pada masa perang dingin, kebijakan luar negeri Amerika Serikat disusun untuk mengimbangi kekuatan Uni Soviet yang mulai dominan menanamkan pengaruhnya di negara-negara Eropa Timur. Dalam menghadapi perang dingin ini, Amerika Serikat membuat tiga kebijakan ini yaitu, *Marshall Plan*, *The Point Four programme* dan *The Mutual Security Concept*. Amerika Serikat harus mendapatkan keunggulan atas Uni Soviet dengan melibatkan diri menyelesaikan peperangan agar dapat memberikan pengaruhnya di berbagai kawasan di dunia, seperti pada perang Vietnam tahun 1965. Perang dingin antara dua kubu ini berlangsung selama beberapa dekade dan resmi berakhir antara tahun 1989-1990 dengan memunculkan Amerika Serikat sebagai pemenang sekaligus sebagai kekuatan tunggal di dunia. Sementara itu, kebijakan Amerika Serikat pasca perang dingin diarahkan pada membangun tatanan hidup baru bagi dunia internasional melalui perluasan perdagangan dan berperan sebagai polisi dunia yang ikut menyelesaikan berbagai macam konflik internasional dengan dukungan kekuatan dominan Amerika Serikat. Tujuan dari melibatkan diri sebagai polisi dunia adalah upaya untuk menjamin keamanan dan perdamaian dunia.

Tuntutan untuk mengubah kebijakan luar negeri kembali menerpa Amerika Serikat ketika negara ini mengalami tragedi pengeboman oleh teroris yang menghebohkan publik dunia. Tragedi WTC memaksa Amerika Serikat menerapkan kebijakan baru yang disebut kampanye WOT melalui pengiriman pasukan militer ke luar negeri untuk menumpas terorisme dalam bentuk apapun. Kebijakan WOT periode presiden Bush berbeda dengan presiden Obama. Presiden Bush cenderung mengerahkan seluruh kekuatan militer Amerika Serikat sementara presiden Obama memadukan militer dengan diplomasi. Perbedaan lain ditunjukkan presiden Obama pada kebijakan pengiriman pasukan militer ini, yaitu menginisiasi adanya kebijakan

penarikan pasukan militer di beberapa negara, seperti Irak dan Afghanistan. Presiden Obama berhasil melakukan penarikan pasukan luar negeri di Irak pada tahun 2011 sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan. Namun berbeda dengan Afghanistan yang rencana awalnya akan dilakukan penarikan pasukan militer secara berkala selama 3 tahun berturut-turut yakni 2011-2014 tetapi terpaksa ditangguhkan karena beberapa hal.

Kebijakan penangguhan penarikan pasukan militer Amerika Serikat di Irak terjadi karena pada tahun 2012, Afghanistan direpotkan dengan kebangkitan Taliban baru dan Al-Qaeda dengan kekuatan dua kali lebih besar dari tahun pertama ketika Amerika Serikat dan sekutu melakukan perlawanan terhadap mereka. Dua kelompok radikal ini bangkit dan menguasai hampir seluruh wilayah di Afghanistan sehingga menyebabkan krisis keamanan dengan ribuan korban berjatuhan melebihi jumlah perang 13 tahun di Afghanistan. Ketidakmampuan *Afghan National Security Force* (ANSF) menangani bangkitnya kekuatan kedua kelompok radikal ini membuat presiden Obama mempertimbangkan adanya penarikan pasukan militer. Disisi lain, jenderal yang berada di lapangan juga menghendaki adanya penambahan pasukan militer guna mengimbangi dan mengalahkan Taliban dan Al-Qaeda yang menyebabkan banyak pasukan militer gugur.

Selain krisis keamanan di Afghanistan sebagai penyebab ditanggungkannya pasukan militer Amerika Serikat, adanya permintaan dan perjanjian yang disepakati oleh kedua Amerika Serikat dan Afghanistan melalui pendekatan presiden Ashraf Ghani kepada presiden Obama pasca pelantikannya sebagai presiden terpilih tahun 2014. Pendekatan yang dilakukan presiden Ghani sangat bertolak belakang dengan apa yang sebelumnya dilakukan presiden Karzai ketika menjalin hubungan dengan presiden Amerika Serikat dalam rangka WOT ini. Pendekatan kekerabatan dan *open minded* yang lekat dengan presiden Ghani tidak membuatnya kesulitan untuk menjalin komunikasi dan membujuk presiden Obama untuk melakukan penarikan pasukan militer di Afghanistan secara

fleksibel, tanpa harus terpacu pada rencana awal. Pertimbangan hal-hal diatas membuat presiden Obama mantab untuk melakukan penangguhan penarikan pasukan militer di Afghanistan hingga akhir tahun 2016 dan akhirnya menyepakati *Bilateral Security Agreement* (BSA) dengan Afghanistan yang mengatur masalah kelanjutan keterlibatan Amerika Serikat dan sekutu termasuk pasukan militer didalamnya.

Dalam skripsi ini, banyak sekali fenomena yang dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebijakan suatu negara tidak terbatas pada lingkungan domestik dan kepentingan negara semata, melainkan juga peristiwa-peristiwa dadakan yang bisa saja memiliki pengaruh luar biasa layaknya tragedi WTC. Kejadian luar biasa ini juga mengajarkan mengenai pentingnya mengkaji masalah keamanan dan pertahanan bagi suatu negara berikut juga kondisi aparat dan pasukan untuk mendukung kualitas pengamanan dan pertahanan negara, baik itu negara besar maupun negara kecil. Pembahasan pada skripsi ini menunjukkan bahwa suatu negara juga bisa secara tiba-tiba dituntut untuk mengubah arah kebijakan luar negeri seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Walaupun sudah sejak lama mengatur kebijakan penarikan pasukan militer di Afghanistan, tetapi terpaksa ditangguhkan karena alasan-alasan yang tidak bisa diganggu gugat. Maka dari itu, perumusan rencana kebijakan luar negeri bisa saja tidak sejalan dengan realitas yang terjadi di lapangan sehingga rencana dan ekspektasi berbeda.

Hal-hal yang perlu dipelajari ketika membahas mengenai pembahasan kebijakan penangguhan penarikan pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan adalah pentingnya memahami konsep politik luar negeri Amerika Serikatyang ternyata sangat dinamis. Tidak berhenti disitu, penulis diharuskan mengetahui determinan-determinan yang dijadikan pertimbangan Amerika Serikat dalam mengolah sebuah kebijakan. Sesuai dengan teori William D. Coplin yang menaruh tiga determinan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan luar negeri, yakni kondisi domestik, kapasitas

ekonomi dan militer, serta faktor internasional. Selain itu juga mengetahui pentingnya memahami politik global dalam menganalisa politik luar negeri. Disisi lain, pemanfaatan mata kuliah sebagai modal pengetahuan pada skripsi ini seperti Politik Global Amerika Serikat, Kajian Timur Tengah, Kajian Strategis, dan lainnya.

Pembahasan pada skripsi ini memiliki fokus pada eksplorasi faktor internasional sebagai determinan utama kebijakan penanggulangan pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan. Usulan yang mungkin dapat dikembangkan berdasarkan temuan pada skripsi ini misalnya elaborasi faktor lainnya yaitu pertimbangan politik domestik Amerika Serikat dalam menetapkan kebijakan luar negeri. Kemudian pembahasan mengenai negara-negara lain yang juga ikut terlibat dalam perjalanan WOT Amerika Serikat di Afghanistan seperti Pakistan dan lainnya. Dapat digali lebih dalam lagi mengenai faktor lain yang menyebabkan perubahan kebijakan Amerika Serikat di Afghanistan dalam memerangi terorisme seperti kondisi perekonomian. Atau juga bisa melakukan eksplorasi mengenai konsep *smart power* yang dilakukan presiden Obama dalam memutuskan kebijakan luar negeri selama kepemimpinannya.